

## RINGKASAN

**Dinda Agustina Harahap  
200510205**

**Pemenuhan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Malahayati, S.H., LL.M.)**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa akta kelahiran adalah bukti identitas setiap anak, yang dalam pentingnya pencatatan akta kelahiran ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada akta kelahiran anak akan mencantumkan nama orang tua si anak, dengan membuktikan Akta Nikah dari orang tua. Namun di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara masih terdapat pasangan yang tidak mempunyai Akta Nikah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hak bagi anak di luar perkawinan, tetapi tetap saja masih terdapat kendala yang dihadapi pasangan atau orang tua pada saat pemenuhan akta kelahiran anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dan kendala dalam pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Hasil penelitian yang di dapat tata cara pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pada umumnya sama saja, namun perbedaannya adalah akta kelahiran anak di luar perkawinan (*siri*) dapat dicantumkan nama ayah dan ibunya, tetapi dicantumkan pula secara tegas bahwa perkawinan orang tua dari si anak tersebut “belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan bagi anak hasil dari *zina* terhadap akta kelahirannya tetap mencantumkan nama ibunya saja. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum, serta orang tua yang tidak memiliki Akta Nikah. Upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani pemohon sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, serta berupaya memberikan informasi dan penjelasan terkait pemenuhan akta kelahiran anak kepada masyarakat di instansi.

Saran diperlukan kontribusi Masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, serta dibutuhkan sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara kepada pemuka adat terkait akta kelahiran anak di luar perkawinan.

**Kata kunci: Akta Kelahiran, Anak Di Luar Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

## SUMMARY

**Dinda Agustina Harahap  
200510205**

***Fulfillment of Birth Certificates for Children Born Out of Wedlock Post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (Research Study at the Population and Civil Registration Office of North Padang Lawas Regency)***  
**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Malahayati, S.H., LL.M.)**

*Article 5 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, a birth certificate is proof of the identity of each child, the importance of recording birth certificates is strictly regulated in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The child's birth certificate will include the names of the child's parents, with proof of the parents' marriage certificate. However, in the North Padang Lawas Regency area, there are still couples who do not have a marriage certificate. After the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provided protection for the rights of children outside of marriage, there are still obstacles faced by married couples when fulfilling their child's birth certificate.*

*This research aims to find out and explain the procedures for fulfilling birth certificates for children outside of marriage at the Population and Civil Registry Service of North Padang Lawas Regency and the obstacles in fulfilling birth certificates for children outside of marriage after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and efforts to overcome these obstacles.*

*This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literature research was carried out to obtain secondary data of a theoretical nature, while field research was carried out to obtain primary data through interviews.*

*The research results, it was found that the procedure for completing a birth certificate for a child outside of marriage is generally the same, but the difference is that the birth certificate of a child outside of marriage can include the names of the father and mother, but it also states explicitly that the marriage of the child's parents "not yet registered in accordance with statutory regulations". Meanwhile, for children resulting from adultery, their birth certificates still include only the mother's name. The obstacles faced are a lack of legal awareness, parents do not have a marriage certificate. In an effort to overcome these obstacles, the Population and Civil Registry Service functions in accordance with applicable Standard Operating Procedures, and strives to provide information and explanations regarding the fulfillment of child birth certificates to the community at the agency.*

*Suggestions require the community's contribution to register their marriages, and outreach is needed from the North Padang Lawas Population and Civil Registration Service to traditional leaders regarding the birth certificates of children outside of marriage.*

***Keywords: Birth Certificates, Children Out of Wedlock, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010***